
Paradigma Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam: Konsep, Model dan Problematika

Abdullaah Hasyim Zain^{1*}, Umi Farihah², Khoirul Anwar³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Korespondens Penulis: abdullahhasyim.zain72@gmail.com*

Abstract. This study aims to examine the evaluation of Islamic education policies, including their concepts, models, and issues. The background to this research is the low level of understanding of the importance of evaluation in Islamic education policies. This study aims to provide a deeper understanding of the importance of evaluation in Islamic education policies. This study uses a library research approach as the primary method for examining the research object, namely the evaluation of Islamic education policies. The results of the study can be described as: evaluation of Islamic education policies is a crucial process for assessing the policy's suitability to Islamic values, national goals, and community needs. Evaluation is not merely administrative in nature but also serves as a means of reflection and continuous improvement. Each evaluation model has its own advantages, and its application needs to be tailored to the character, context, and objectives of Islamic education. However, the implementation of Islamic education policy evaluation in Indonesia is still hampered by limited resources, weak coordination, and a lack of Islamic value-based instruments, resulting in evaluations that tend to be administrative in nature.

Keywords: Evaluation, Islamic Education Policy, Concepts, Models, Problems.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evaluasi kebijakan pendidikan Islam, baik dari segi konsep, model dan problematika evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya pemahaman tentang pentingnya evaluasi dalam kebijakan pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya evaluasi dalam kebijakan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) sebagai metode utama untuk mengkaji objek penelitian, yakni evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan Islam merupakan proses penting untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai Islam, tujuan nasional, dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Setiap model evaluasi memiliki keunggulan tersendiri, dan penerapannya perlu disesuaikan dengan karakter, konteks, serta tujuan pendidikan Islam. Namun, pelaksanaan evaluasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, dan minimnya instrumen berbasis nilai Islam, sehingga evaluasi cenderung administratif.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan Pendidikan Islam, Konsep, Model, Problematika.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah aspek fundamental dalam upaya membentuk manusia seutuhnya. Kepribadian atau karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang diperolehnya, baik bagi individu maupun bagi kemajuan suatu bangsa di masa depan. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan, manusia

sangat memerlukan pendidikan. Tanpa pendidikan, seseorang akan kesulitan mengembangkan pengetahuan dan menggali potensi yang ada dalam dirinya, serta memahami berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya.

Pendidikan Islam merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk karakter umat. Perannya tidak hanya terbatas pada penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembinaan individu yang beriman kuat, bertakwa mendalam, dan berakhhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan tersebut sejalan dengan konsep *maqashid al-ta'lim*, yakni menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mewujudkan manusia paripurna (*al-insān al-kāmil*) yang memiliki keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial (Farhana, 2024). Secara mendasar, kebijakan pendidikan Islam memiliki sifat yang holistik dan kontekstual, dengan menggabungkan kerangka pendidikan umum serta prinsip-prinsip utama Islam seperti keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pembebasan (*tahrir*). Pendekatan ini menitikberatkan pada pengembangan kemampuan intelektual dan moral, dengan tujuan melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai spiritual dan etika yang kuat (Nadliroh, 2024).

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah, lembaga pendidikan, dan penyelenggara pendidikan Islam terus berupaya merancang serta melaksanakan berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan-kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki sistem pembelajaran, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman, dan menghadapi tantangan masyarakat modern yang semakin kompleks. Namun, meskipun banyak kebijakan telah disusun dengan baik, hasil yang diperoleh sering kali tidak sesuai dengan harapan akibat adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan kebijakan adalah proses evaluasi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan tersebut (Nadila, 2023). Tanpa adanya evaluasi yang tepat, akan sulit menentukan apakah tujuan pendidikan yang telah dirumuskan benar-benar tercapai atau bahkan menyimpang dari rencana semula. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Abdul Mujib dan rekan-rekannya, yang menyatakan

bawa tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dapat diketahui melalui proses evaluasi (Sa'diyah, 2022). Dengan kata lain, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran berhasil dicapai oleh peserta didik setelah penerapan suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama terletak pada rendahnya pemahaman para pelaku pendidikan terhadap konsep dasar evaluasi itu sendiri. Banyak pihak di lingkungan pendidikan Islam yang masih memandang evaluasi sebatas kegiatan formal, seperti ujian akhir semester atau pemberian rapor, tanpa menyadari bahwa evaluasi mencakup proses yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, tidak sedikit lembaga pendidikan Islam yang belum memiliki pedoman evaluasi yang standar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Prayitno & Ashari, 2023). Kurangnya standarisasi evaluasi yang jelas mengakibatkan hasil evaluasi tidak dapat menjadi acuan yang valid untuk perbaikan kebijakan. Sering dilakukannya evaluasi secara spontan, tanpa perencanaan yang matang mengakibatkan hasilnya tidak objektif dan tidak dapat diandalkan.

Keterbatasan sumber daya manusia turut menjadi kendala yang cukup besar. Banyak sekolah dan madrasah belum memiliki tenaga profesional di bidang evaluasi pendidikan, sehingga proses evaluasi sering dilakukan secara terbatas dan tidak komprehensif. Selain itu, kurangnya dukungan dana untuk pelaksanaan evaluasi yang bersifat profesional menyebabkan banyak lembaga pendidikan Islam tidak dapat menjalankan evaluasi secara optimal (Akhyar, 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya evaluasi dalam kebijakan pendidikan Islam. Pembahasan akan meliputi konsep dasar evaluasi, berbagai model evaluasi yang relevan, kriteria evaluasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta problematika yang muncul dalam penerapannya di lembaga pendidikan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan mutu serta efektivitas evaluasi kebijakan pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) sebagai metode utama untuk mengkaji objek penelitian, yakni evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang lebih menekankan analisis teoretis dan konseptual terhadap berbagai konsep, model, kriteria, serta tantangan dalam penerapan evaluasi di lembaga pendidikan Islam. Pendekatan ini dianggap sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat reflektif dan normatif tanpa memerlukan pengumpulan data primer secara langsung di lapangan. Proses studi pustaka dilakukan dengan menghimpun, menelaah, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Sumber-sumber tersebut mencakup literatur primer seperti buku, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, dokumen kebijakan, hasil penelitian terdahulu, serta referensi klasik dalam kajian pemikiran pendidikan Islam.(Fariq et al., 2022). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder sebagai pelengkap data, seperti makalah seminar, laporan hasil penelitian, serta bahan ajar yang memiliki relevansi dengan topik kajian.

Proses pengumpulan data diawali dengan penelusuran berbagai literatur yang membahas konsep evaluasi dalam pendidikan, model-model evaluasi, serta problematika penerapannya di lembaga pendidikan Islam. Data diperoleh melalui perpustakaan fisik dan digital, basis data jurnal ilmiah, situs resmi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, serta repositori perguruan tinggi yang menyediakan akses terbuka (*open access*). Setiap sumber yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan tingkat validitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap fokus penelitian. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data yang dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai konsep evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Proses analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data: Menyaring informasi yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian dari seluruh sumber yang telah diperoleh.

2. Kategorisasi Informasi: Mengelompokkan data berdasarkan aspek-aspek tertentu, seperti konsep evaluasi, model evaluasi, kriteria penilaian, serta tantangan penerapan.
3. Sintesis dan Interpretasi: Mengintegrasikan serta menafsirkan informasi dari berbagai sumber guna membentuk argumen yang logis dan selaras.
4. Verifikasi: Membandingkan hasil temuan dari beragam literatur untuk memperkuat kesimpulan dan memastikan bahwa analisis didukung oleh landasan teoretis yang kokoh.

Dalam rangka menjaga kredibilitas dan validitas penelitian, setiap kutipan atau ide yang diambil dari sumber lain selalu disertakan dengan rujukan lengkap sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan silang terhadap berbagai literatur guna memastikan bahwa interpretasi yang dibuat tidak bersifat subjektif, melainkan berpijak pada pandangan para ahli di bidang pendidikan Islam dan evaluasi kebijakan. Meskipun metode ini tidak melibatkan observasi atau wawancara secara langsung, penelitian tetap memiliki nilai akademik yang tinggi karena didasarkan pada kajian yang sistematis dan mendalam terhadap berbagai sumber yang saling berkaitan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoretis yang kuat dalam memahami dinamika evaluasi kebijakan pendidikan Islam di lembaga pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*, yang dalam bahasa Indonesia berarti *penilaian*. Kata tersebut berakar dari kata *value* dalam bahasa Inggris, yang bermakna *nilai* dalam bahasa Indonesia (Warman et al., 2023). Menurut Suchman, evaluasi merupakan rangkaian langkah yang dilakukan untuk menggambarkan, menemukan, dan menyajikan informasi yang berguna dalam menilai berbagai alternatif keputusan. Sejalan dengan itu, Stufflebeam berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk menilai pelaksanaan program, dengan tujuan memperoleh ukuran yang objektif dan valid mengenai keberhasilan program tersebut. Sementara itu, Scriven mengartikan evaluasi sebagai proses untuk menentukan

manfaat, nilai, atau kualitas suatu produk maupun kegiatan. Istilah yang berkaitan dengan proses ini mencakup aktivitas seperti menilai, menganalisis, mengkritisi, memeriksa, meninjau, mengevaluasi, serta mempelajari secara mendalam (Mergoni & De Witte, 2022).

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan aspek penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan efektif, relevan, dan berdampak sesuai tujuan. Proses evaluasi ini perlu didasarkan pada data yang akurat, dilaksanakan secara transparan, serta menggunakan metode yang sistematis agar dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sistem pendidikan nasional (Sinambela et al., 2024).

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan apakah kebijakan pendidikan yang diterapkan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan serta memberikan dampak yang diharapkan bagi sasaran yang dituju. Proses ini dilakukan melalui penerapan analisis kebijakan guna menilai efektivitas kebijakan tersebut dan potensi keberhasilannya dalam pelaksanaan. Melalui evaluasi ini, dapat diketahui berbagai kelebihan maupun keterbatasan yang muncul dalam penerapan kebijakan pendidikan (Gunawan et al., 2023).

Dalam konteks perubahan dan pengembangan pendidikan, evaluasi yang mendalam tidak hanya berperan dalam menilai hasil, tetapi juga dalam merumuskan strategi ke depan yang lebih responsif terhadap dinamika perubahan global maupun lokal. Melalui pendekatan yang bersifat kolaboratif dan inovatif, kebijakan pendidikan dapat terus disesuaikan guna mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif (Sawaluddin et al., 2022). Perubahan ini juga perlu menjadikan keadilan sebagai landasan utama, agar setiap individu tanpa pengecualian dapat memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Dengan evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan terarah, kebijakan pendidikan memiliki potensi lebih besar untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat (Thomafi et al., 2024).

Dalam ranah pendidikan Islam, evaluasi tidak hanya bersifat teknis seperti yang umumnya diterapkan dalam pendidikan umum, tetapi juga mengandung dimensi normatif dan spiritual. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara aspek *aqliyah* (intelektual), *nafsaniyah* (emosional), *ruhiyah* (spiritual), dan *jasadiyah* (fisik). Oleh sebab itu, konsep evaluasi dalam pendidikan Islam harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara menyeluruh dan terpadu (Fadilah et al., 2025).

Pada hakikatnya, kebijakan pendidikan Islam memiliki sifat yang menyeluruh dan kontekstual, dengan memadukan sistem pendidikan umum dan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta pembebasan (*tahrir*). Pendekatan ini berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual dan moral, dengan tujuan melahirkan lulusan yang tidak hanya berilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki landasan spiritual dan etika yang kuat (Nadliroh, 2024). Manajemen serta kepemimpinan yang efektif di lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut, karena keduanya berperan dalam memastikan bahwa nilai-nilai Islam terintegrasi dalam setiap aspek pendidikan (Alfaniah & Fauji, 2024).

Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan Islam di Indonesia hingga kini belum dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Proses evaluasi masih cenderung bersifat formal dan administratif, dengan fokus pada pencapaian indikator kuantitatif seperti jumlah lembaga terakreditasi, tingkat partisipasi pendidikan, dan jumlah lulusan. Padahal, pendidikan Islam mengandung dimensi nilai serta pembentukan karakter yang tidak dapat diukur semata-mata melalui data statistik. Evaluasi kebijakan yang berorientasi pada angka saja belum mampu menggambarkan kualitas proses pembelajaran, efektivitas penanaman nilai-nilai Islam, maupun dampak nyata kebijakan terhadap peserta didik dan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu kelemahan utama dalam evaluasi kebijakan pendidikan Islam terletak pada kurangnya keterpaduan antara evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sering kali tidak

selaras dengan evaluasi dari pihak eksternal seperti Kementerian Agama atau lembaga akreditasi. Di samping itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi SDM maupun teknologi, menyebabkan proses evaluasi tidak berjalan secara rutin dan mendalam. Akibatnya, umpan balik yang diperoleh belum mampu memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan kebijakan berikutnya. Dalam konteks madrasah, misalnya, evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum dan pembentukan karakter peserta didik masih belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek pedagogis Islam secara menyeluruh. Proses penilaian masih lebih menitikberatkan pada hasil ujian tertulis, sedangkan dimensi spiritual, akhlak, dan integritas belum terintegrasi secara utuh dalam sistem evaluasi nasional. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan Islam dan praktik penilaianya di lapangan (Sapriadi et al., 2025).

Kebijakan-kebijakan inovatif seperti moderasi beragama dan penguatan nilai-nilai keislaman yang inklusif juga masih belum didukung oleh perangkat evaluasi yang memadai. Belum tersedia indikator yang jelas untuk menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut berhasil diinternalisasikan dalam proses pembelajaran maupun tercermin dalam perilaku sehari-hari peserta didik. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan instrumen evaluasi yang lebih kontekstual dan multidimensional agar keberhasilan program-program pendidikan Islam dapat dinilai secara lebih komprehensif. Evaluasi yang ideal seharusnya tidak sekadar berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi menjadi bagian dari siklus kebijakan yang bersifat reflektif dan berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat tercapai apabila proses evaluasi melibatkan berbagai pihak, seperti guru, siswa, orang tua, pengawas, dan masyarakat. Keterlibatan banyak pemangku kepentingan dalam evaluasi akan menghasilkan pemahaman masalah yang lebih tepat serta solusi yang lebih relevan dengan kondisi di lapangan. (Sapriadi et al., 2025).

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih memerlukan sistem evaluasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada substansi. Evaluasi tidak hanya sebatas menilai capaian administratif,

tetapi harus mampu mengukur sejauh mana kebijakan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran, penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan peserta didik, serta relevansinya dalam menghadapi arus globalisasi dan kebutuhan umat Muslim Indonesia. Melalui pendekatan evaluasi yang komprehensif dan holistik, kebijakan pendidikan Islam dapat diarahkan dengan lebih tepat menuju terwujudnya pendidikan yang bermakna, berdaya ubah, dan membawa kemajuan peradaban.

Model-Model Evaluasi

Kementerian Agama (Kemenag) memegang peran penting dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan pendidikan Islam. Hal ini disebabkan Kementerian Agama merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Selama ini, Kemenag cenderung menyesuaikan arah kebijakannya dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdikbud), terutama terkait standar nasional pendidikan dan kurikulum. Namun, dalam hal evaluasi, Kemenag memerlukan pendekatan yang lebih khas dan selaras dengan filosofi serta tujuan pendidikan Islam. Evaluasi dalam konteks pendidikan Islam tidak hanya dimaksudkan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, tetapi juga untuk menyediakan umpan balik berkelanjutan sebagai dasar perbaikan program di masa mendatang. Untuk itu, dibutuhkan model evaluasi yang sejalan dengan karakter, sifat, dan tujuan dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Dalam pendidikan Islam, model evaluasi harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah, tujuan pendidikan Islam (*maqashid al-ta'lim*), serta memperhatikan dinamika sosial dan budaya masyarakat tempat lembaga pendidikan beroperasi (Fadillah et al., 2025).

Dalam model evaluasi kebijakan pendidikan, para ahli telah merumuskan beragam model evaluasi kebijakan pendidikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Model Evaluasi Berorientasi Tujuan (*Goal Oriented Evaluation*)

Model evaluasi ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1961, dengan fokus utama pada “sejauh mana tujuan pembelajaran

yang telah ditentukan dapat tercapai.” Indikator pencapaian tujuannya meliputi prestasi belajar peserta didik, kinerja guru, efektivitas proses belajar mengajar, serta mutu layanan pendidikan (Fionita et al., 2024). Model ini dikembangkan oleh Ralph Tyler, seorang tokoh berpengaruh dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi. Fokus utama dari model ini adalah pada tujuan program yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaannya dimulai, dan proses evaluasinya dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan (Gunawan et al., 2023).

Adapun tahap pelaksanaan model evaluasi ini, diantaranya sebagai berikut (Dilapanga & Rantung, 2022) :

- a. Menentukan tujuan
- b. Merumuskan indikator
- c. Mengembangkan instrumen
- d. Memastikan program telah berakhir
- e. Menganalisis data
- f. Membuat kesimpulan
- g. Mengambil kesimpulan

2. Model Evaluasi Tanpa Fokus pada Tujuan (*Goal-Free Evaluation*)

Michael Scriven mengembangkan konsep *Goal-Free Evaluation*, yaitu pendekatan evaluasi di mana penilai (*evaluator*) tidak terikat pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi ini menitikberatkan pada perubahan perilaku yang muncul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Prosesnya mencakup pengamatan terhadap dampak positif maupun negatif, lalu membandingkannya dengan kondisi sebelum kebijakan tersebut dijalankan (Nasihi & Hapsari., 2022). Menurut Scriven, hal yang penting untuk diperhatikan adalah kinerja pada setiap tahapan program. Model ini lebih menekankan pada pencapaian tujuan umum program daripada melakukan penilaian secara terperinci (Gunawan et al., 2023).

Adapun evaluasi ini memiliki tiga jenis dampak, diantaranya sebagai berikut (Dilapanga & Rantung, 2022) :

- a. Dampak simpangan negatif yaitu dampak yang tidak diketahui oleh program
- b. Dampak positif yaitu pengaruh yang sesuai dengan tujuan
- c. Dampak simpangan positif yaitu dampak positif program diluar pengaruh positif yang telah diterapkan

Model ini sangat berguna untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan Islam yang bersifat holistik dan memiliki nilai-nilai yang sulit diukur secara kuantitatif. Sebagai contoh, ketika sebuah kebijakan diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan shalat berjamaah di madrasah, mungkin muncul dampak tambahan seperti meningkatnya rasa solidaritas antar siswa atau bertambahnya keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. Dampak-dampak semacam ini meskipun tidak termasuk dalam tujuan awal, tetap penting untuk dievaluasi sebagai bagian dari hasil keseluruhan kebijakan (Fadillah et al., 2025).

3. Model Evaluasi Formatif dan Sumatif (*Formative and Summative Evaluation*)

Scriven juga mengembangkan model evaluasi yang membagi proses pelaksanaannya ke dalam dua tahap, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan saat program masih berjalan, dengan tujuan memberikan masukan atau umpan balik guna memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan (Maksum & Arifin, 2022). Sebagai contoh, monitoring mingguan atau bulanan dapat dilakukan untuk mengamati pelaksanaan kurikulum baru di madrasah. Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir dengan tujuan menilai hasil dan dampak keseluruhan kebijakan. Misalnya, penilaian akhir terhadap prestasi akademik dan akhlak siswa setelah satu tahun penerapan kebijakan. Penerapan model ini dalam pendidikan Islam sangat bermanfaat untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dievaluasi setelah

selesai, tetapi juga terus diawasi dan disempurnakan selama proses berlangsung (Fadillah et al., 2025).

4. Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

Model ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan dianggap sebagai salah satu model evaluasi yang paling menyeluruh dalam bidang pendidikan. Model evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP) berfokus pada proses pengambilan keputusan dalam setiap tahap evaluasi. Model CIPP mencakup empat komponen utama (Nukhbatillah et al., 2024)

a. *Context Evaluation*

Tahap ini bertujuan untuk menilai kondisi awal atau latar belakang sebelum suatu kebijakan dijalankan. Di dalamnya mencakup analisis terhadap kebutuhan, permasalahan, serta potensi yang dimiliki lembaga pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, fase ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan di lapangan, seperti rendahnya pemahaman siswa terhadap nilai-nilai akhlak.

b. *Input Evaluation*:

Tahap ini berfokus pada penilaian terhadap sumber daya, strategi, dan rencana pelaksanaan kebijakan. Pada fase ini, Kemenag memiliki peran krusial dalam menyediakan pedoman, kurikulum, serta tenaga pendidik yang sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam.

c. *Process Evaluation*

Tahap ini menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana, bagaimana tanggapan peserta didik dan guru, serta kendala apa saja yang muncul selama implementasi. Dalam konteks pendidikan Islam, tahap ini sangat penting karena banyak

aspek, seperti pembentukan akhlak, tidak bisa diukur hanya dari hasil akhir.

d. Product Evaluastion

Tahap terakhir ini berfokus pada penilaian terhadap hasil atau dampak kebijakan setelah jangka waktu tertentu. Contohnya, apakah terjadi peningkatan dalam kualitas pembelajaran, perbaikan perilaku siswa, serta peningkatan daya saing lulusan madrasah.

Model CIPP sangat relevan diterapkan untuk mengevaluasi kebijakan berskala besar, seperti pembaruan kurikulum pendidikan Islam, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, serta pelatihan guru yang berorientasi pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis (Fadillah et al., 2025).

5. Countenance Evaluation Model

Contenance evaluation model dikembangkan oleh stake, Model Evaluasi Countenance merupakan pendekatan evaluasi yang digunakan untuk menentukan tahapan dalam suatu proses serta berbagai faktor yang memengaruhinya (Warman et al., 2023). Evaluasi ini berfokus pada program pendidikan dengan tujuan mengidentifikasi setiap tahapan proses pendidikan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Model ini terdiri atas tiga tahap utama, yaitu: (Fionita et al., 2024)

a. Antecedent phase

Tahap ini dilakukan sebelum program dijalankan. Evaluasi difokuskan pada kondisi awal program, termasuk faktor-faktor yang diperkirakan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya, serta kesiapan siswa, guru, staf administrasi, dan sarana pendukung sebelum pelaksanaan dimulai.

b. Transaction phase

Tahap ini dilakukan selama program berlangsung. Evaluasi difokuskan untuk menilai apakah pelaksanaan

program sesuai dengan rencana, serta meninjau tingkat partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan kemandirian kepala sekolah dalam menjalankannya.

c. *Outcomes phase*

Tahap ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pelaksanaannya.

- 1) Apakah pelaksana program menunjukkan perilaku positif dan kinerja yang optimal?
- 2) Apakah peserta atau penerima manfaat merasa puas terhadap program yang dijalankan?
- 3) Perubahan perilaku apa saja yang tampak setelah program selesai dilaksanakan?

6. Model Evaluasi Responsif (*Responsive Evaluation*)

Model ini dikembangkan oleh Stake, model evaluasi responsif merupakan pendekatan yang diterapkan pada kebijakan sosial atau pada isu-isu yang membutuhkan tindakan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Fokus utamanya terletak pada respon berbagai pihak terhadap kebijakan yang dijalankan, dengan menelaah hubungan sebab akibat yang muncul dari pelaksanaannya (Warman et al., 2023).

Model evaluasi ini dirancang untuk merespons dinamika yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Berbeda dari model-model sebelumnya yang bersifat lebih terstruktur, Model Evaluasi Responsif menawarkan fleksibilitas dengan menyesuaikan proses evaluasi terhadap konteks lokal serta perubahan situasi yang terjadi di lapangan (Pratama & Febriani, 2024).

Ciri khas dari model ini yaitu kepekaan terhadap perubahan serta dinamika lokal, fleksibilitas dalam penyesuaian indikator evaluasi, dan keterlibatan aktif evaluator dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pendidikan Islam, model ini sangat

sesuai diterapkan di wilayah yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, dan pandangan keagamaan. Sebagai ilustrasi, penerapan kebijakan kurikulum baru di madrasah wilayah Aceh mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaksanaannya di Jawa Tengah. Model evaluasi responsif memberi ruang bagi evaluator untuk menyesuaikan metode serta instrumen evaluasi agar tetap relevan dengan kondisi lokal (Fadillah et al., 2025).

7. *Discrepancy Evaluation Model (DEM)*

Istilah *discrepancy* berarti gap atau kesenjangan. Model evaluasi kesenjangan (*Discrepancy Evaluation Model*) dikembangkan oleh Malcom Provus (Warman et al., 2023) model ini berfokus pada perbandingan antara hasil evaluasi dan standar kinerja yang telah ditetapkan. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan terkait program yang telah dijalankan, apakah perlu ditingkatkan, dilanjutkan, atau dihentikan (Nasihi & Hapsari., 2022).

Evaluasi kebijakan menggunakan model DEM mencakup empat tahapan kegiatan yang disesuaikan dengan tahap-tahap pelaksanaan organisasi atau kebijakan yang akan dievaluasi: (Fionita et al., 2024)

- a. Mengidentifikasi program (*program defination*), evaluasi berfokus pada substansi atau isi program, metode, cara-cara, mekanisme untuk mencapai tujuan
- b. Penyusunan program (*program installation*), evaluasi diarahkan untuk menilai sejauh mana perbedaan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan.
- c. Hasil yang dicapai program (*program goal attainment*), evaluasi memiliki tujuan untuk menafsirkan hasil temuan serta memberikan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa revisi terhadap program atau melanjutkan pelaksanaan program yang ada.

Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam berperan penting dalam memastikan mutu dan relevansi pelaksanaan pendidikan agar selaras dengan nilai-nilai Islam serta kebutuhan masyarakat modern. Namun, dalam pelaksanaannya, evaluasi kerap menghadapi beragam tantangan yang menghambat efektivitasnya. Tantangan tersebut bersifat multidimensi, mencakup aspek manusia, struktur organisasi, sumber daya, hingga budaya dalam lembaga pendidikan (Fadillah et al., 2025).

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan pendidikan, tidak semua berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan kerap muncul, di antaranya yaitu: (Jaysurrohman et al., 2021)

1. Terbatasnya ketersediaan sumber daya untuk evaluasi serta kurangnya tenaga evaluator kebijakan pendidikan.
2. Adanya hambatan politik, di mana pelaksanaan program sering terhambat atau bahkan gagal karena setiap kelompok cenderung menutupi kekurangan program akibat adanya kepentingan dan kesepakatan politik.
3. Minimnya data dan informasi terkini, karena data yang tersedia belum berkualitas baik, sementara penyediaan data sering dianggap sebagai rutinitas atau formalitas tanpa memperhatikan substansinya.
4. Dari sisi ekonomi, dana yang dialokasikan untuk pengumpulan dan pengolahan data sangat terbatas, termasuk biaya bagi staf administrasi dan evaluator. Kegiatan evaluasi kebijakan pendidikan akan sulit berjalan efektif tanpa dukungan finansial dari lembaga pendidikan.
5. Dalam aspek psikologis, pelaksana kegiatan sering memandang evaluasi kebijakan pendidikan sebagai penilaian atas prestasi pribadi mereka, sehingga hal ini dapat menjadi hambatan bagi perkembangan karier mereka karena faktor kenyamanan yang ingin dipertahankan.

6. Adanya subjektivitas dalam pandangan para pihak terkait, di mana perbedaan sudut pandang menimbulkan perbedaan dalam menilai dan memecahkan masalah kebijakan.
7. Munculnya masalah koordinasi dan hubungan antarpihak yang menyulitkan ketika dibutuhkan solusi bersama atas suatu permasalahan.
8. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat menyebabkan kesulitan dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, karena persoalan yang muncul saat ini sering kali tidak lagi relevan di masa mendatang, bahkan memunculkan masalah baru yang lebih kompleks.
9. Terjadinya ketidakjelasan tujuan kebijakan pendidikan akibat adanya kompromi yang dipaksakan sejak tahap awal dalam proses perumusan kebijakan.

KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan pendidikan Islam merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tujuan pendidikan nasional, serta kebutuhan masyarakat modern. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan administratif, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.

Dalam konteks Islam, evaluasi memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan dan pembentukan akhlak mulia. Karena itu, evaluasi kebijakan pendidikan Islam harus dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta berpijakan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pembebasan.

Berbagai model evaluasi dapat digunakan untuk menilai kebijakan pendidikan Islam, antara lain model berorientasi tujuan (*Goal Oriented Evaluation*), *Goal-Free Evaluation*, *Formative and Summative Evaluation*, CIPP (*Context, Input, Process, Product*), *Countenance Evaluation Model*, *Responsive Evaluation Model*, dan *Discrepancy Evaluation Model (DEM)*. Setiap model

memiliki keunggulan tersendiri, dan penerapannya perlu disesuaikan dengan karakter, konteks, serta tujuan pendidikan Islam.

Namun, pelaksanaan evaluasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, minimnya data yang valid, hambatan politik, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya instrumen evaluasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akibatnya, evaluasi sering kali hanya bersifat administratif dan belum menyentuh substansi pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik.

Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang komprehensif, partisipatif, dan kontekstual, yang melibatkan berbagai pihak seperti pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Dengan evaluasi yang adaptif dan berkelanjutan, kebijakan pendidikan Islam dapat diarahkan untuk benar-benar meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat nilai-nilai Islam, serta menyiapkan generasi Muslim yang berilmu, berakh�ak, dan mampu menghadapi tantangan global dengan berpegang pada prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Akhyar, Y. (2024). Faktor-faktor Penghambat Implementasi Manajemen Mutu dalam Pendidikan Islam di Marasah Aliyah Swasta. *Journal of Education Research*, 5(1), 711–717. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.917>

Alfaniah, A., Fauji, I. (2024). Manajemen Pendidikan Islam Menurut Al-Qur'an: Analisis dan Implementasi. *TSAQOFAH: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(1), 418–431. <https://doi.org/10.58578/taqofah.v5i1.4499>

Dilapanga, A., & Rantung, M. (2022). *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Deepublish.

Fadillah, R., Saprifha, E., Paturahman, S. H., Febriadi, R. A., Renata, A. (2025). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam : Konsep, Model, Kriteria, Dan Tantangan Implementasi Di Lembaga Pendidikan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1717–1734. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1160>

Farhana, N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 58–63. <http://dx.doi.org/10.29040/jie. v10i1.12305>

Fariq, W. M., Zamsiswaya, & Tambak, S. (2022). Telaah Kepustakaan (Narrative , Tinjauan Sistematis, Meta- Analysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif , Mix Method). *Journal Social Society* 2(2), 75–84. <https://doi.org/10.54065/jss.2.2.2022.264>

Fionita, W., Lauchia, R., Windari, S., & Wijaya, H. A. (2024). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 5732–5739. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i6.4535>

Gunawan, A., Surham, M. A., & Syaifuddin, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan.

ULIL ALBAB : *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(1), 149–157. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2527>

Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam evaluasi kebijakan pendidikan di indonesia. *BINTANG : Jurnal Pendidikan dan Sains*, 3(2), 215–227. <https://doi.org/10.36088/bintang.v3i2.1292>

Maksum, A., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 97–112.

Mergoni, A., & Witte, K. D. (2021). Policy evaluation and efficiency : a systematic literature review. *International Transactions in Operational Research*, 29(3), 1337–1359. <https://doi.org/10.1111/itor.13012>

Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Model William Dunn. *JPSS : Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107–113. <https://doi.org/10.56959/jpss.v9i1.100>

Nadliroh, F. (2024). Konsep Dasar Pendidikan Islam. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 1(3), 23–30. <https://doi.org/10.61132/akhlaq.v1i4.103>

Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 77–88. <https://doi.org/10.56855/intel.v1i1.112>

Nukhbatillah, I. A., Setiawati, S., Hasanah, U., & Nurmala, N. (2024). Evaluasi Mutu Pendidikan Menggunakan Pendekatan Teori Stufflebeam. *Jurnal Global Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i1.352>

Pratama, R., & Febriani, E. A. (2024). Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tema Kearifan Lokal di SMAN 2 Kinali. *Naradidik: Journal of Education & Pedagogy*, 3(4), 366–376. <https://doi.org/10.24036/nara.v3i4.239>

Prayitno, E., & Ashari, M. Y. (2023). Peran dan Fungsi Evaluasi dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(1), 48-57. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i1.8>

Sa'diyah, T. (2022). Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Pribadi Yang Islam. *KASTA: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, dan Terapan*, 2(3), 148-159. <https://doi.org/10.58218/kasta.v2i3.408>

Sapriadi, N. R., Unir, U. U., Yusoiani., & Musdalifah. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam: Studi Atas Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Program Pendidikan Di Indonesia. *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 14(4), 71–80.

Sawaluddin, Syahbudin, K., Rido, I., & Ritonga, S. (2022). Creativity on Student Learning Outcomes in Al-Quran Hadith Subjects. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 3(2), 257–263. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v3i2.106>

Sinambela, S. M., Lumbantobing, J. N. Y., Saragih, M. D., Mangunsong, A. F., Nisa, C., Simanjuntak, J. P., & Jamaludin. (2024). Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 14-24. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3003>

Warman, W. Komariyah, L., & Khairunnisa, K. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3(SE), 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3iSE.2912>

Thomafi, N. A. S., Zuhdi, M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum di MIN 14 Al-Azhar Asy-Syarif Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*, 8(2), 79–95. <https://doi.org/10.37012/jipmht.v8i2.2379>